



INOVASI PEMKOT DIAPRESIASI PEMDA DIY

Konsep M3K Efektif Tangani Kawasan Kumuh

YOGYA (KR) - Sejak tahun 2015 Pemkot Yogya mengencarkan konsep Mundur Munggah Madhep Kali (M3K) dalam menata kawasan di bantaran sungai. Konsep tersebut dinilai konsep efektif dalam menangani kawasan permukiman kumuh di Kota Yogya yang sebagian besar berada di bantaran sungai.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sumadi SH MH, mengungkapkan konsistensi Pemkot dalam mengulirkan inovasi M3K dalam menata kawasan atau permukiman kumuh diapresiasi oleh Pemda DIY berupa penghargaan Cipta Bhakti Nugraha. Kota Yogya menempati peringkat pertama untuk memperoleh penghargaan atas perencanaan pembangunan tingkat kabupaten/kota serta bentuk sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan nasional tersebut. "Penghargaan diberikan pada saat Musrenbang DIY di Kepatihan pada Kamis (6/4) lalu. Itu menjadi motivasi untuk terus berkomitmen dalam mengembangkan inovasi," tandasnya, Senin (10/4).

Melalui konsep M3K tersebut rumah yang berada di bantaran sungai diminta untuk memundurkan bangunan setidaknya minimal tiga meter dari garis sempadan. Selanjutnya bangunan dibuat lebih tinggi layaknya ru-

mah susun serta menghadap ke sungai. Dengan begitu tidak hanya masalah fisik atau infrastruktur yang ditata melainkan sosial hingga ekonomi masyarakat setempat. Hal ini karena sempadan dan bantaran sungai bisa dikembalikan sebagaimana fungsinya serta terdapat akses untuk mitigasi. Ruang tiga meter dari garis sempadan dijadikan jalan inspeksi yang bisa dimanfaatkan oleh publik. Setidaknya armada darurat seperti pemadam kebakaran serta ambulans mampu mengakses jalan inspeksi tersebut sehingga akan memudahkan penanganan setiap kejadian darurat.

Selain itu ruang tersebut juga menjadi perlindungan bagi warga setempat dari bahaya longsor. Bahkan bisa dimanfaatkan sebagai sarana sanitasi bersama yang selama ini menjadi persoalan bagi warga di bantaran sungai karena lokasi permukimannya cenderung lebih rendah. Rumah warga yang kini menghadap sungai terbukti

mampu mengubah paradigma dalam merawat sungai. Sebagai halaman depan, maka sungai bukan lagi menjadi tempat membuang sampah atau limbah. Apalagi terdapat jalan inspeksi yang tersambung dengan akses jalan protokol menjadikan aktivitas masyarakat meningkat. "Dari konsep itu harapannya produktivitas masyarakat juga meningkat hingga derajat ekonominya semakin baik. Jadi tidak hanya permukiman kumuhnya saja yang tertata namun juga berdampak terhadap sosial dan ekonomi," urainya.

Hasil penataan M3K sudah bisa dilihat di seluruh sungai yang menjadi landmark Kota Yogya seperti Kali Code, Kali Gajah Wong, Kali Winongo hingga Kali Belik. Hampir seluruh bantaran di seluruh sungai tersebut kini telah tertata rapi dan terdapat jalan inspeksi yang bisa diakses kendaraan darurat.

Kendati demikian, pola penanganan kawasan kumuh tahun ini tidak lagi mendapat sokongan dari provinsi maupun pusat. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang terdapat intervensi dari pusat maupun provinsi sehingga bisa menyoal skala kawasan. Oleh karena itu

dengan hanya mengandalkan APBD Kota Yogya maka penataan kawasan kumuh hanya fokus pada menyelesaikan indikator yang ada di kawasan tersebut. Terdapat tiga lokasi yang akan disasar yakni Klitren, Pakuncen, dan Prawirodirjan.

Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogya Sigit Setiawan, sebelumnya menjelaskan ada tujuh indikator kumuh yang menjadi acuan. Di antaranya menyangkut kondisi bangunan, jalan lingkungan, drainase, sistem air bersih, sanitasi hingga proteksi kebakaran. Masing-masing kawasan kumuh memiliki indikator yang berbeda-beda. Pihaknya akan menuntaskan indikator yang masih tinggi di suatu kawasan. Seperti di Klitren yang akan fokus pada penataan sanitasi dengan total alokasi Rp 1 miliar. Penanganan di Klitren sudah dilakukan sejak tahun lalu, terlebih masyarakat di kawasan tersebut sudah memundurkan rumah dari tepi Kali Belik untuk mendukung penataan sanitasi.

"Kalau nanti sanitasi sudah bisa tertangani maka skornya akan semakin bagus," tandasnya. **(Dhi)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 10 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005